



PAPER – OPEN ACCESS

## Tafsir Sosial atas Bencana Banjir oleh Komunitas Tepi Hutan

Author : Lutfi Amiruddin dan Yogi E. C. Farobi  
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.608  
Electronic ISSN : 2654-7066  
Print ISSN : 2654-7058

*Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



# Tafsir Sosial atas Bencana Banjir oleh Komunitas Tepi Hutan

## *Social Interpretation of Flood Disasters by Forest Edge Communities*

Lutfi Amiruddin<sup>a</sup> dan Yogi E. C. Farobi<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Dosen dan peneliti pada Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Malang, Indonesia

<sup>b</sup>Alumni Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Malang, Indonesia

Email : [amiruddin.lutfi@ub.ac.id](mailto:amiruddin.lutfi@ub.ac.id)

### **Abstract**

*As a forest edge community, Sidoasri Village, Sumbermanjing Wetan Sub-district, Malang Regency experienced many ecological changes since the implementation of Community Collaborative Forest Management (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/PHBM) in early 2000s. This condition also triggers a change in disaster conditions. After the forestlands ultivated by the people, the flood becomes annually agenda. Using phenomenology approach, by interviewing and observing some informants, this paper describes that knowledge of disasters has changed. Villagers know that before implementation of PHBM disaster was triggerred by natural phenomena, however after PHBM implemented, they regard that the forest management created the flood. The forest edge community experience a dilemma; on the one hand utilizing forest can sustain their economic condition, but on the other hand, it creates disaster risk. Their knowledge related to external and internal conditions, obtained through ecological change and social interaction.*

*Keywords: forest edge community, flood, disaster*

### **Abstrak**

Sebagai komunitas tepi hutan, Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang mengalami banyak perubahan ekologis sejak diterapkannya kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada awal 2000an. Kondisi ini juga memicu perubahan kondisi kebencanaan. Setelah lahan hutan digarap oleh warga, banjir menjadi agenda rutin yang hampir tiap tahun terjadi. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, dengan mewawancarai dan mengamati beberapa informan, tulisan ini menguraikan bahwa terdapat perubahan pengetahuan atas bencana oleh warga desa ini. Jika sebelum ada kebijakan PHBM bencana banjir dipicu karena aktivitas alamiah saja, maka setelahnya, warga menyadari bahwa aktivitas pengelolaan hutan menjadi pemicu banjir. Warga tepi hutan ini mengalami dilemma; di satu sisi memanfaatkan lahan hutan dapat menopang perekonomian, namun di sisi lain justru menciptakan risiko bencana. Pengetahuan tersebut terkait dengan kondisi eksternal dan internal yang didapat melalui perubahan ekologis maupun interaksi sosial.

Kata Kunci: komunitas tepi hutan; bencana; banjir

## **1. Penelitian**

Sebagai desa yang diapit oleh wilayah hutan dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, membuat Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, memiliki potensi alam yang melimpah. Potensi ini tercermin dari mata pencaharian penduduk yang menggantungkan pada hasil alam. Kondisi alam yang berbukit juga membuat warga berfokus untuk mengolah perkebunan cengkeh, kopi, dan pisang yang berada di lahan hutan Negara yang dikelola Perhutanan. Sedangkan di wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan juga dimanfaatkan warga untuk menghasilkan produk perikanan. Kondisi alam desa ini mempengaruhi jenis pekerjaan

yang ditekuni oleh warga desa ini. Pekerjaan bidang perkebunan menempati urutan tertinggi yang mengindikasikan bahwa memang masyarakat menggantungkan diri di sektor agraris. Namun demikian, meski menawarkan potensi alam yang melimpah, ternyata sering kali terjadi bencana banjir di desa ini.

Kondisi sosial Desa Sidoasri juga khas. Selain merupakan komunitas tepi hutan, penduduk Desa Sidoasri berlatar belakang sebagai penganut Protestan dan Islam. Yunita menyajikan data bahwa pada tahun 2008 Desa Sidoasri memiliki penduduk sebesar 4.630 jiwa yang sebagian besar beragama Kristen Protestan mencapai 90 % dari jumlah warga keseluruhan [1]. Hal inipun diperkuat oleh laporan Sutopo, dkk, [2] yang menunjukkan bahwa jumlah gereja yang ada di Sidoasri yang jumlahnya sebanyak tujuh gereja, sementara masjid hanya satu buah. Umat Kristiani biasa beraktivitas ibadah rutin ke gereja setiap hari Minggu. Selain itu, ada penyelenggaraan KRW (Kristen Rukun Warga), yakni ibadah yang dilakukan di rumah-rumah warga secara bergantian setiap hari Selasa Sementara aktivitas keagamaan warga minoritas, yakni Islam setiap jumat melakukan ibadah sholat yang berpusat di masjid yang ada di Dusun Baran tepatnya di seberang sungai. Gereja Kristen juga terbagi menjadi beberapa jemaat, seperti Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Pantekosta Isa Almasih (GPIA), dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA).

Catatan penulis menunjukkan bahwa pada Juli 2013 lalu telah terjadi bencana banjir setinggi lebih dari 1 meter menggenangi wilayah desa ini. Demikian pula yang terjadi pada musim hujan tahun 2016 dan 2017. Meski tercatat tek pernah ada korban jiwa, bencana banjir menjadi agenda tahunan desa baru hasil pemekaran tahun 2007 tersebut. Deskripsi Purba, dkk, menunjukkan bahwa hampir setiap tahun, banjir melanda di tiap musim hujan. Penyebabnya adalah alih fungsi hutan menjadi hutan produksi tanaman komoditas seperti pohon tahunan seperti kopi, cengkeh, dan pisang [3].

Dalam percakapan sehari-hari warga menyebutnya sebagai *tetelan*, yakni istilah yang merujuk pada lahan hutan yang dirambah, ditebang kayunya, lalu ditanami dengan tanaman komoditas tersebut. Orang-orang yang dilibatkan oleh Perhutani dalam penanaman hutan dengan cara tumpang sari dengan tegakan-tegakan pohon tersebut juga disebut sebagai *pesanggem*. Biasanya yang dilibatkan adalah warga masyarakat tepi hutan [4].

Secara geografis, wilayah Sidoasri dikelilingi oleh bukit berhutan yang berbentuk cekungan menyerupai tapal kuda [3]. Desa ini juga dibelah oleh tiga sungai, yang juga sering kali meluap ketika hujan. Air kiriman dari bukit yang tidak tertahan oleh tegakan, membuatnya mengalir langung melalui sungai-sungai yang ada di desa ini. Luapan sungai yang disebabkan karena pendangkalan karena lumpur bawaan dari bukit, memberikan sumbangan bagi terjadinya luapan air bah.

Dengan kondisi di atas, masyarakat tepi hutan ini memiliki pengetahuan dengan adanya bencana banjir, sesuai dengan pengetahuan, masyarakat memaknai bencana. Pengetahuan tentang bencana telah menjadi bagian masyarakat bertahun-tahun dan telah menjadi pengalaman yang mengendap dalam memori kolektif mereka [5]. Dengan demikian, pengetahuan atas bencana di desa tepi hutan ini menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari yang tak terpisahkan. Akan tetapi pengalaman atas bencana banjir tersebut tidak serta merta menjadikan komunitas ini memahami dan mempraktekkan bagaimana melakukan mitigasi bencana.

Tulisan ini bertujuan menjelaskan bahwa bencana banjir yang terjadi di wilayah tepi hutan seperti Sidoasri berhubungan dengan aktivitas manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Sebagai *pesanggem*, tentunya aktivitas warga mempengaruhi kejadian bencana banjir. Karena menjadi fenomena tahunan, maka bencana tersebut mempengaruhi pengetahuan warga. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karena wilayah geografisnya yang berada pada cekungan dengan dikelilingi bukit berhutan, wilayah Desa Sidoasri sering kali mengalami bencana banjir. Maka tulisan ini menelusuri konstruksi pengetahuan komunitas pinggir hutan tersebut atas banjir dengan menggunakan perspektif konstruksi sosial yang dibangun oleh Berger dan Luckman dengan melakukan penelusuran secara fenomenologis realitas obyektif dan subyektif masyarakat [6]. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, komunitas pinggir hutan ini menyadari dan telah mengetahui jika aktivitas perambahan hutan menjadi salah satu pemicu banjir, namun demikian hal ini tak bisa dihindari. Tidak adanya pilihan pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, membuat warga memilih tetap bekerja sebagai *pesanggem*.

Tulisan ini mencoba melanjutkan model analisis Peluso yang menjelaskan tentang kebijakan perhutanan yang dilakukan oleh Perhutani pada awal 2000an [4]. Sebelumnya warga desa hutan tak dapat mengakses hutan negara yang dikelola Perhutani, yang justru menciptakan perlawanan. Baru setelah ada kebijakan Perhutanan Sosial, warga diajak untuk menjadi *pesanggem*, mengelola hutan sebagai tenaga kerja, atau disebut sebagai *magersari*. Alih-alih memberikan peluang bagi masrakat tepi hutan, kebijakan ini justru menciptakan ketegangan-ketegangan baru antara Pehutani dengan warga desa hutan. Namun demikian, yang patut dicatat adalah adanya perbedaan kondisi ekologis di

yang menjadi lokus tulisan ini dengan Peluso. Jika Peluso menggambarkan lokus kajiannya berada di wilayah Blora yang berada pada dataran rendah, dengan komoditas utama hutan berupa jati, maka tulisan ini memiliki lokus pada komunitas tepi hutan yang berada di wilayah perbukitan. Kondisi geografis semacam ini tentu saja berpengaruh pada kondisi kebencanaan dari segi *hazard* (marabahaya), seperti longsor dan banjir, yang tidak ditemui pada karya Peluso.

## 2. Tinjauan Pustaka

Untuk mendalami konstruksi pengetahuan atas bencana yang terjadi di desa tersebut, digunakanlah peta pemikiran konstruksi realitas sosial yang diutarakan oleh Berger dan Luckman [6]. Kerangka teoritis ini menekankan pembahasannya pada hubungan antara individu dengan masyarakat. Peter L. Berger dan Thomas Luckman merupakan tokoh yang berusaha untuk membahas secara lebih jelas mengenai proses konstruksi realitas sosial ini. Dalam teori yang dikemukakannya, Berger dan Luckman mempertimbangkan bahwa realitas adalah sebuah konstruksi yang dibentuk oleh masyarakat melalui proses interaksi yang dilakukan. Dengan demikian, terlihat bahwa perhatian sentral dari teori ini adalah bagaimana sebuah makna dapat dimunculkan melalui proses interaksi dan bagaimana pula makna tersebut terlihat seperti sebuah kenyataan.

Kenyataan didefinisikan oleh Berger dan Luckman sebagai “sebuah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang dianggap berada di luar kemampuan manusia (sebab kenyataan tersebut tidak dapat dienyahkan)” [7]. Dengan demikian kenyataan merupakan sesuatu yang bebas dari keinginan atau pilihan setiap individu. Individu tidak dapat memilih kenyataan karena kenyataan tersebut diberikan begitu saja kepada mereka, bahkan tanpa keinginan sekalipun. Jadi, individu sebenarnya tidak memiliki kenyataannya sendiri. Mereka hanya menerima realitas yang telah terbentuk jauh sebelum individu tersebut dilahirkan di dunia ini dan mereka diharuskan untuk menyesuaikan diri terhadap realitas bentukan tersebut. Kenyataan dengan demikian bersifat memaksa terhadap kesadaran setiap individu dan bersifat obyektif, berada di luar individu itu sendiri.

Secara ringkas teori ini membahas tentang realitas yang terbentuk secara sosial dan sosiologi pengetahuan bertugas menganalisa bagaimana proses tersebut dapat terjadi. Berger dan Luckman menegaskan realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subyektif dan obyektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana manusia tersebut mempengaruhinya melalui proses internalisasi yang mencerminkan realitas subyektif [7]. Pada proses eksternalisasi, realitas ditanamkan ke dalam diri individu oleh orang-orang di sekelilingnya. Dengan demikian terlihat bahwa realitas sosial sesungguhnya hidup di luar individu, sehingga dikatakan obyektif. Sedangkan di dalam proses internalisasi, seorang individu mulai menggunakan dunianya sendiri untuk memaknai hal-hal yang ada di sekelilingnya. Dengan demikian realitas bersifat subyektif bagi individu tersebut.

Dalam konteks kebencanaan, sampai saat ini belum ada definisi yang ditetapkan secara bulat oleh para ilmuwan. Perkembangan penelitian kebencanaan, baik di Indonesia maupun di level dunia oleh Abdullah dikatakan tertinggal. Kajian bencana pada awalnya hanya merupakan satu bagian kecil dari penelitian sosial. Biasanya dibahas, karena “kebetulan” si peneliti memiliki pengalaman empiris di lapangan [8]. Abdullah menambahkan, hal ini disebut sebagai “ketertinggalan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan”[8].

Mengenai definisi bencana, Kreps dan Drabek mencoba menggambarkan bahwa bencana sebagai sesuatu “yang datang secara tiba-tiba, dramatis, yang berbeda dengan kejadian sehari-hari yang rutin” [9]. Sebaliknya, Abdullah menegaskan kalau bencana merupakan bagian dari kehidupan normal masyarakat. Artinya, manusia sesungguhnya hidup berdampingan dengannya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana masyarakat menghadapinya [8]. Yang menjadi titik fokus Abdullah sesungguhnya bagaimana kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman yang sebenarnya akrab dengannya. Oleh karena itu, maka penelitian ini berusaha menggali pengertian bencana dari masyarakat lokal, yang pada gilirannya akan tergambarkan bagaimana pemahaman akan bencana yang rutin terjadi dan kaitannya dengan aktivitas warga desa. Hal ini memang warga Sidoasri telah akrab dengan bencana banjir yang hampir tiap tahun mendatangi mereka. Perubahan-perubahan ekologis berupa pengelolaan hutan oleh warga lokal membuat kondisi mereka menjadi rentan.

Namun demikian, meskipun ada perbedaan mendasar atas kedua definisi di atas, tetap saja bahwa bencana dapat mempengaruhi relasi sosial, termasuk pula mempengaruhi pengetahuan masyarakat. Bencana menguji ketahanan relasi sosial di antara korban. Di satu sisi bencana bisa memperkuat ikatan sosial antara warga, tetapi di sisi yang lain justru melemahkan hubungan sosial tersebut [10]. Bencana berpotensi mengganggu organisasi sosial dan ekonomi

juga mengubah relasi sosial, tidak hanya kepada masyarakat yang terkena dampak langsung, tetapi juga antara masyarakat terdampak dengan entitas di luarnya, seperti masyarakat selain korban, maupun pemerintah [11].

Maka dengan menggunakan kerangka teori konstruksi realitas sosial, pengetahuan atas bencana oleh komunitas tepi hutan ini dilakukan. Teori konstruksi sosial ini tidak menjelaskan hubungan antara individu dengan masyarakat secara terpisah, melainkan dihubungkan dalam satu hubungan yang bersifat dialektis, saling mempengaruhi serta membentuk satu sama lain. Masyarakat dilihat sebagai produk manusia dan sebaliknya manusia dilihat sebagai produk dari masyarakat. Begitu pula dengan konteks masyarakat Sidoasri, ini diasumsikan tidak terpisah dengan proses-proses kenyataan obyektif dan subyektif dalam kehidupan. Bencana yang sering menimpa kehidupan mereka dimaknai dalam kehidupan sebagai kenyataan sehari-hari warga.

### 3. Metode

Dalam tulisan ini, diasumsikan bahwa perubahan lingkungan fisik berhubungan dengan aktivitas masyarakat yang tinggal di dalamnya. Atau dengan kata lain, banjir yang terjadi merupakan bagian dari dampak aktivitas manusia di wilayah hutan. Aktivitas manusia tentu tak dapat dipisahkan dengan kondisi risiko bencana. Namun demikian, aktivitas manusia dalam merambah hutan memiliki dasar pengetahuan ekologis tertentu. Maka, penting dilakukan penelusuran mendalam terkait pengetahuan tersebut. Metode kualitatif dianggap mampu membantu peneliti untuk menemukan dan memahami permasalahan utama dalam tulisan ini, yakni pengetahuan komunitas tepi hutan Desa Sidoasri.

Pendekatan yang digunakan untuk mengkerangkai tulisan ini adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada fokus pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Jadi, peneliti ingin memahami bagaimana dunia muncul kepada orang lain [12]. Atau dengan kata lain, peneliti ingin memahami dunia obyektif sekaligus subyektif masyarakat tepi hutan terkait dengan realitas bencana yang ada. Dengan demikian, dalam pendekatan fenomenologi, peneliti berusaha melihat realitas sosial berdasarkan sudut pandang subjek.

Untuk menggali data, beberapa aktivitas dilakukan, antara lain wawancara, pengamatan, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Narasumber dipilih berdasarkan kategori tertentu seperti para perambah hutan dan petani sawah, beberapa pemuka agama dari beberapa komunitas gereja dan dari imam Masjid. Selain umat beragama, mereka juga memiliki pengalaman mengenai banjir yang melanda desa ini.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Kondisi Ekologis Sidoasri

Sebelum berdiri menjadi desa yang mandiri, Sidoasri merupakan wilayah dusun, bagian dari wilayah Desa Tambakasri, Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang. Sejak 2007, Sidoasri berpisah dengan Tambakasri. Tujuan pemisahan desa ini agar wilayah Sidoasri menjadi lebih mandiri. Jarak dan aksesnya dengan pusat desa yang relatif jauh juga menjadi alasan pemisahan desa. Untuk mengurus surat-surat administratif saja, misalnya, warga harus menempuh jalan yang berliku dan menanjak agar dapat menuju pusat pemerintahan Desa Tambakasri dengan berjarak sekitar 5 km. Maka pada Bulan Agustus 2007, Sidoasri secara resmi menjadi desa baru hasil pemekaran. Untuk mengatur unit administratif yang lebih sempit, desa baru ini membagi wilayahnya secara administratif menjadi 33 Rukun Tetangga (RT).

Secara geografis, wilayah Sidoasri diapit oleh daerah perbukitan. Wilayah desa ini berada di tengah-tengah bukit berhutan yang mengelilingi dari wilayah utara, timur dan barat. Wilayah topografis perbukitan ini membentuk rupa bumi menyerupai cekungan [3], dan Sidoasri berada di tengah-tengahnya. Di bagian selatan, Desa Sidoasri berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dengan dikelilingi perbukitan berhutan, maka untuk mencapai Desa Sidoasri harus menggunakan hanya satu akses jalan dari arah utara.

Terdapat tiga sungai yang ada di desa ini, yaitu Sungai Kemudinan, Jokromo, dan Mbah Ger. Semua sungai ini bermuara di Samudra Hindia. Sungai Kemudinan memiliki lebar sekitar 15 m dengan kedalaman 0,5 m ini sering kali meluap ketika musim hujan tiba, dan memberikan ancaman banjir bagi warga. Luapan air biasanya bercampur dengan lumpur yang berasal dari longsor tanah dari bukit yang mengelilingi desa ini. Secara geografis sungai ini membelah

wilayah Sidoarsi menjadi dua, dan menciptakan penyebutan desa secara kultural, yakni Sidoasri *wetan kali* (timur sungai), yang secara administratif juga disebut sebagai wilayah Dusun Baran, dan Sidoasri *kulon kali* (barat sungai). Sungai kedua adalah Jokromo. Sungai ini sangat penting bagi pertanian warga, karena menjadi sumber air bagi saluran irigasi warga. Namun sungai yang melintasi bagian tengah desa ini tercatat pula pernah meluap pada tahun 2010. Tinggi air yang mencapai 1 meter menggenangi rumah warga, sawah, kantor desa setempat, jalan, dan fasilitas umum lainnya.

Ketiga adalah Sungai Mbah Ger. Lokasinya berada di wilayah Sidoasri bagian barat. Sebenarnya sebutan nama Mbah Ger digunakan menyebut nama jembatan yang dibangun untuk menghubungkan wilayah yang dipisahkan oleh sungai dan menghubungkan jalan menuju pantai. Warga kemudian menyebut sungai tersebut sama dengan nama jembatan. Nama Mbah Ger merupakan nama panggilan untuk salah seorang sesepuh desa yang tinggal di dekat jembatan yang kini ada. Nama aslinya adalah Gerwaning Aji. Untuk memepmudahkan menyebutnya maka warga memberikan nama orang tersebut untuk menyebutkan nama jembatan dan sungai. Lebar sungai ini sekitar 10 meter, dengan kedalaman hanya setinggi mata kaki. Akan tetapi jika meluap, tinggi air dipastikan dapat mencapai lebih dari dua meter.

Intensitas luapan banjir tiap musim hujan meningkat semenjak diterapkannya kebijakan PHBM. Tegakan pohon yang awalnya berupa hutan alamiah berganti menjadi pohon pisang dan cengkeh, dipahami warga sebagai salah satu penyebab banjir. Karena perubahan tegakan tersebut, air hujan beserta lumpur langsung turun dan masuk ke dalam tiga badan sungai tersebut, membuat air mudah meluap dan berubah menjadi banjir. Luapan air bah inilah yang mengancam kehidupan warga.

Pada 2013 lalu, Jembatan Mbah Ger mengalami kerusakan serius akibat banjir bandang. Pada bagian pondasi terlihat terkikis akibat arus sungai. Sedangkan pada bagian badan jembatan mengalami retak-retak. Akibat kerusakan ini, mobil dilarang melintasi jembatan. Selain merusak bangunan jembatan, banjir waktu itu juga mengancam kehidupan warga terutama yang tinggal di dekat sungai Mbah Ger. Tahun 2014 jembatan ini telah diperbaiki dan sudah bisa dimanfaatkan kembali hingga saat ini.

Karena terdapat hutan di sekitar wilayah desa dan adanya aturan mengenai pengelolaan hutan rakyat, maka banyak warga yang memanfaatkan hutan tersebut untuk dirambah. Hutan yang berada di wilayah dan dekat dengan wilayah Sidoasri sebenarnya hutan lindung yang menjadi hak pengelolaan Perhutani. Hutan Perhutani tersebut dirambah oleh warga untuk kemudian ditanami berbagai macam tanaman produksi, seperti kopi, cengkeh, maupun pisang. Warga Sidoasri menyebutnya sebagai lahan *tetelan*, yaitu kebun warga yang berlokasi di wilayah hutan lindung [1]. Sayangnya tidak ada data secara pasti tentang luas lahan *tetelan*, perkembangan luas *tetelan* dari tahun ke tahun, siapa pemanfaatnya, maupun bagaimana aturan main dalam membuka lahan. Dan dapat dipastikan pula, luas lahan rambahan ini bisa jadi terus bertambah seiring kebutuhan warga. Namun demikian, dari lahan *tetelan* ini, ada banyak komoditas yang dihasilkan warga seperti cengkeh, kopi, pisang, maupun kelapa. Termasuk pula, apabila seseorang baru membuka lahan di hutan lindung ini, maka kayu dari hasil penebangan ini dapat dimanfaatkan sendiri atau dijual.

#### 4.2. Kondisi Sosial Ekonomi Sidoasri

Kehidupan ekonomi masyarakat Sidoasri bergantung pada hasil alam. Berikut adalah kondisi pekerjaan warga Desa Sidoasri:

Tabel 1. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sidoasri

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Pertanian	2551 orang	78,71 %
2.	Jasa/Perdagangan		
	• Jasa Pemerintahan	9 orang	0,27 %
	• Jasa Perdagangan	110 orang	3,39 %
	• Jasa Angkutan	25 orang	0,77 %
	• Jasa Keterampilan	6 orang	0,18 %
	• Jasa Lainnya	13 orang	0,40 %
3.	Sektor Industri	15 orang	0,46 %
4.	Sektor lain	512 orang	15,79 %
	Jumlah	3.241 orang	100,00%

Sumber: RPJM Desa Sidoasri 2010-2014 (dalam Yunita [1]).

Sidoasri adalah penghasil berbagai macam komoditas pertanian, seperti cengkeh, kopi, pisang, sengon, dan kelapa. Semua produk tersebut ditanam di lahan *tetelan*. Sedangkan untuk pertanian sawah, padi juga dihasilkan oleh petani-petani Sidoasri. Biasanya, komoditas tersebut setelah dipanen, kemudian didistribusikan melalui tengkulak. Terdapat tengkulak yang datang sendiri untuk mengambil dan membelinya, ada pula dari petani yang mengirimkannya ke tempat tengkulak. Lokasi pengiriman untuk berbagai macam komoditas, terutama cengkeh, kopi, kelapa, dan pisang berada di Pasar Dampit Kabupaten Malang.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab Latar Belakang, mayoritas warga Sidoasri memeluk Kristen Protestan penganut Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW). Sedangkan sebagian kecil Muslim. Namun demikian, kehidupan keagamaan, menurut catatan, dapat berjalan dengan harmonis. Umat beragama saling berkunjung ketika umat agama lain sedang merayakan hari raya [1].

Aktivitas keagamaan dapat diketahui dari rutinitas ibadah warga mayoritas yang selalu pergi ke gereja pada hari Minggu. Selain itu, ada penyelenggaraan Kristen Rukun Warga (KRW), yakni ibadah yang dilakukan di rumah warga setiap Selasa pada sore hari. Aktivitas KRW diadakan secara bergiliran di antara para jemaat. Untuk warga muslim selain setiap Jumat melakukan ibadah Shalat Jumat di masjid, juga terdapat bentuk ibadah komunal yakni tahlilan setiap Jumat malam. Ibadah shalat Jumat dipusatkan di masjid di wilayah Baran, sedangkan *Tahlil* dilakukan secara bergilir di rumah warga muslim. Karena memang jumlahnya yang minoritas, aktivitas peribadatan muslim hanya diikuti oleh lebih sedikit orang [2].

#### 4.3. Banjir dalam Rentang Sejarah Sidoasri

Sejak tahun 2001, kondisi hutan yang ada di wilayah Tambakasri mulai dirambah oleh warga. Aktivitas ini terkait dengan kebijakan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid terkait hutan rakyat. Pada masa Gus Dur, hutan yang awalnya merupakan hak pengelolaan Perhutani dapat dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan cara kemitraan dengan pihak Perhutani. Konsep pengelolaan ini disebut dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang didasarkan pada Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 (Khususiyah, 2009). Secara konseptual, PHBM adalah:

*“...Suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama-sama antara Perum Perhutani dan masyarakat desa, atau Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.” (Khususiyah, 2009: 2)*

Pada sistem PHBM Kabupaten Malang, sebelum diadakan kontrak kerja sama antara Perhutani dengan masyarakat pengelola hutan diberikan, terlebih dulu dibuat sebuah organisasi yang dinamakan Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH). Anggota LKDPH adalah masyarakat peserta program PHBM dan para pengurusnya. Lembaga ini menjadi pengelola lahan Perhutani di desa hutan yang tugasnya yaitu bekerjasama atau menjalin kemitraan dengan berbagai macam *stakeholder* dengan Perhutani dalam rangka pelestarian alam dan pembangunan hutan. Di samping itu, LKDPH juga difungsikan sebagai wadah penyalur aspirasi para petani warga desa tepi hutan peserta PHBM [13].

Warga desa yang tinggal di tepi hutan, juga mendapatkan dampak dari keputusan di atas. Setelah kerjasama dengan pihak Perhutani diadakan, dan LKDPH dibentuk, warga kemudian berbondong-bondong membuka hutan. Potongan-potongan kayu hasil penebangan disebut dalam Bahasa Jawa dengan *tetelan*. Setelah menebangi pohon, kemudian warga menanaminya dengan berbagai komoditas, seperti kopi, cengkeh, pisang, dan sengon. Sedangkan pohon yang telah ditebang kayunya dapat dijual atau dimanfaatkan sendiri untuk kebutuhan warga. Dari proses ini terjadi perubahan macam tegakan, yang awalnya berupa tegakan pohon alamiah yang membentuk hutan, berubah menjadi pepohonan penghasil komoditas perdagangan.

Mekanisme pengelolaan hutan di Sidoasri mengalami banyak pergeseran. Pada awal penerapan PHBM, tiap kepala keluarga mendapatkan jatah setengah hektar lahan. Namun banyak pula warga yang membuka hutan secara “liar” untuk dijadikan *tetelan*. Dari proses ini sebenarnya menggambarkan bagaimana pengelolaan dan implementasi pengelolaan hutan oleh masyarakat. Pembukaan hutan secara “liar”, membuat pengelolaan dan pemanfaatan hutan

sulit untuk dikendalikan dan diawasi. Hal ini membuat penelusuran data mengenai siapa saja pemanfaat, luas, jenis tanaman, keuntungan finansial, dan jenis komoditas per luasan menjadi sulit untuk dilakukan. Dalam berbagai kesempatan wawancara dan FGD dengan warga terkait pemilikan lahan *tetelan*, terkesan warga tak tau menau mengenai seputar pengelolaan lahan ini. Maka, dapat dikatakan pengelolaan lahan hutan ini menjadi semakin rumit. Selain tidak tersedianya peta yang jelas, pergantian penguasa lahan hutan membuat ketidakjelasan dalam pengelolaan hutan.

Rumitnya pengelolaan lahan hutan di Sidoasri ini kiranya serupa dengan laporan yang ditulis oleh Khususiyah tentang pengelolaan lahan hutan di Wilayah Pujon dan Ngantang, Kabupaten Malang [13]. Kasus yang ditunjukkannya menunjukkan bahwa masalah muncul ketika pengelola bukanlah masyarakat target program yang memiliki kategori; masyarakat miskin, tak memiliki lahan pertanian, tak memiliki pekerjaan, dan janda. Banyak di antara mereka justru mengalihkan hak pengelolaan kepada orang yang lebih “mampu”, yang prosesnya disebut “uang ganti rugi”. Orang yang lebih mampu tersebut “membeli” lahan hutan dari orang lain yang telah memiliki hak kelola, sehingga pada akhirnya hak kelolanya dapat jatuh kepadanya [13]. Dalam kasus Sidoasri, lahan yang awalnya dibagikan oleh pihak Perhutani kemudian “dijual” kepada orang lain. Dengan mekanisme ini, seseorang dapat memiliki 4 hingga 5 hektar *tetelan*. Jadi, setidaknya terdapat tiga model pembukaan hutan; pertama model pembukaan *tetelan* secara “resmi”, kedua, pembukaan lahan secara “liar”, dan ketiga mekanisme jual beli lahan *tetelan*.

Keputusan warga untuk membuka hutan di Sidoasri sebenarnya memberikan konsekuensi ekologis. Hampir setiap tahun ketika musim hujan tiba, Sidoasri berpotensi mengalami banjir. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri merupakan pengaruh dari pembabatan hutan yang ada di wilayah dan sekitar Sidoasri. Ditambah pula, wilayah Sidoasri yang secara geografis diapit oleh bukit dengan bentuk cekungan menyerupai tapal kuda [3], membuat banjir di desa ini memiliki peluang yang tinggi untuk terjadi. Air hujan yang mengguyur bukit, karena tidak ada tumbuhan tegakan yang menjadi penyangga, menciptakan banjir kiriman. Tiga buah sungai yang melintasi desa inilah yang mendapat limpahan lumpur dan air bah.

Namun tak dapat dipungkiri, membuka lahan hutan dapat membawa keuntungan finansial kepada warga. Informan yang diwawancarai menggambarkan bahwa dari satu komoditas saja, yakni cengkeh, terdapat banyak keuntungan finansial yang didapatkan. Salah seorang informan menggambarkan bahwa karena banyaknya keuntungan finansial mengelola *tetelan* dengan menanam cengkeh, membuat banyak warga memilih pekerjaan ini. Ada banyak warga yang lebih memilih menjadi perambah hutan, dari pada bekerja menjadi buruh tani. Sebab, menjadi buruh tani harian, seseorang hanya menerima upah Rp 40.000, sementara menjadi perambah hutan dengan menanam cengkeh, penghasilannya bisa berkali lipat dari pada itu. Jika menjadi buruh tani harian menuntut seseorang tiap hari harus turun ke sawah, maka menjadi perambah hutan dengan tanaman cengkeh, tidak perlu demikian. Tenaga yang dikeluarkan untuk menjadi petani cengkeh lebih ringan dari pada menjadi buruh tani sawah.

Ketika seseorang membuka hutan, maka diwajibkan untuknya untuk melakukan sistem bagi hasil. Catatan Yunita misalnya, sedikit menggambarkan bagaimana sistem bagi hasil dijalankan antara warga pengelola *tetelan*, LKDPH, dengan pihak Perhutani [1]. Sistem bagi hasil antara warga dengan LKDPH hanya berasal dari komoditas pisang saja. Sedangkan kopi, cengkeh, dan yang lain-lain itu ditangani oleh orang Perhutani itu sendiri. Jadi warga pengelola hutan membayar sejumlah uang yang diserahkan kepada *stakeholder* di atas, yang menjadi semacam pajak atau cukai dengan besaran tertentu.

Namun demikian, jauh sebelum adanya model perambahan hutan di atas, Sidoasri juga beberapa kali terkena bencana. Salah satu narasumber memberikan gambaran mengenai kondisi kebencanaan Sidoasri. Misalnya saat jaman penguasaan Jepang, di wilayah Tambakasri (wilayah Sidoasri sekarang), terdapat kampung pembuat garam, yang berlokasi dekat dengan pantai. Salah seorang narasumber menunjukkan lokasinya berada pada daerah dekat pantai yang sekarang dimanfaatkan sebagai tambak udang. Namun pada suatu masa, pada hari Senin Legi (dalam penanggalan Jawa) kampung ini “*ambblas*” karena banjir bandang besar. Tidak diterangkan secara rinci berapa korban jiwanya, namun dia menggambarkan bahwa kampung tersebut punah, dan aktivitas produksi garam sudah tidak ada lagi. Air banjir bandang berasal dari bukit-bukit yang melingkupi wilayah desa ini.

Bencana besar kedua adalah banjir yang terjadi pada tahun 60an pada saat desa Tambakasri. Banjir besar ini, membuat jembatan desa terputus, sawah juga terendam selama beberapa hari hingga membuat tanaman rusak. Namun tidak ada catatan mengenai korban jiwa dalam bencana ini. Air bah yang menggenangi wilayah Tambakasri mencapai 1,5 meter, hingga masuk ke rumah-rumah warga. Sebenarnya waktu itu, sebagian besar air kiriman dapat ditampung melalui sungai yang melintasi desa. Sungai-sungai yang ada ukurannya sangat dalam, sehingga air sungai dapat



tertampung. Dalam waktu tiga hari, banjir baru surut. Respon warga desa setelah ada banjir besar ini, adalah dengan menjaga keberadaan hutan, yang waktu itu banyak terdapat pohon durian. Namun demikian, pada masa sekarang, terdapat kekhawatiran karena memang vegetasi yang ada di bukit yang mengapit wilayah desa ini berganti bukan lagi tegakan alami hutan.

Jadi, terdapat perubahan ekologis yang sangat mencolok setelah dibukanya hutan melalui program PHBM. Pertama, tinggi badan sungai di saat ini menjadi lebih dangkal. Pendangkalan sungai ini sebenarnya juga terkait dengan aktivitas pembukaan lahan. Jika hutan yang ada di bukit-bukit gundul, maka air hujan akan mengalirkan lumpur dan tanah dari bukit yang kemudian menutupi aliran sungai. Kedua, terdapat pula perbedaan banjir yang terjadi saat sebelum dan setelah pembukaan hutan melalui perhutanan sosial. Jika banjir bandang yang diceritakan di atas bukan banjir tahunan, maka banjir yang terjadi setelah maraknya dibuka lahan *tetelan* menjadi agenda tahunan saat musim hujan. Sebagai contoh, banjir bahkan terjadi tiga kali dalam September 2010. Sedangkan tercatat tidak ada banjir pada 2011. Sementara pada 2012 terjadi banjir yang cukup besar ketika musim hujan. Ketiga, jika pengalaman banjir masa lalu selalu terjadi berhari-hari lamanya, maka banjir saat ini terjadi hanya satu hingga dua jam saja. Namun demikian, perubahan ekologis tetap saja menyimpan marabahaya bagi masyarakat.

#### 4.4. Tafsir Komunitas Tepi Hutan

Penjelasan narasumber tentang perubahan intensitas kejadian banjir pada sub bab sebelumnya sebenarnya menegaskan bahwa, banjir yang terjadi di Sidoasri (dan Tambakasri pada masa lampau) bukan melulu karena fenomena alam semata. Terdapat aktivitas manusia yang melatarbelakangi terjadinya banjir, khususnya pada dekade setelah tahun 2000an. Aktivitas tersebut terkait dengan perambahan hutan, yang menciptakan perubahan-perubahan ekologis dan model bencana. Maka dari itulah pergeseran kejadian banjir ini yang justru menjadi kekhawatirannya.

Wawancara dengan narasumber pendeta GKJW juga menggambarkan bagaimana keterhubungan antara aktivitas manusia dengan terjadinya banjir Desa Sidoasri. Aktivitas membuka hutan secara ekonomi sangat menguntungkan bagi warga desa. Sebelum dibuka hutan kesejahteraan ekonomi warga menghawatirkan. Namun, setelah kesejahteraan meningkat, justru warga menghadapi ancaman bahaya banjir yang lebih besar.

Penjelasan di atas menyiratkan beberapa hal. Pertama menyiratkan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat telah menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat. Tak dapat dipungkiri, pembukaan hutan membawa dampak perubahan ekonomi bagi warga. Pilihan pekerjaan mengelola hutan lebih menjanjikan dari pada pekerjaan lain. Kedua, konsekuensi dari munculnya pembukaan hutan adalah perubahan ekologis. Perubahan ekologis, sekali lagi, terjadi karena kaitannya dengan aktivitas manusia. Hal demikian dapat dipahami bahwa bencana banjir yang ada di desa mereka terjadi akibat perubahan aktivitas manusia. Beberapa subjek mengarahkan pada kesimpulan bahwa pemahaman atas bencana mereka terkait dengan realitas obyektif. Pengertian mereka atas bencana seperti yang diutarakan Berger dan Luckman, bahwa “tatanan sosial hanya ada karena aktivitas manusia” [6].

Mengenai perubahan pekerjaan menjadi penggarap lahan *tetelan* dalam sejarahnya memang baru marak terjadi ketika awal tahun 2001. Setelah dikeluarkannya program PHBM, warga Sidoasri seakan tak bisa lepas dari pekerjaan ini. Membuka lahan hutan memang memberikan keterjaminan secara ekonomi bagi warganya. Dalam kerangka Berger dan Luckman perubahan struktur pekerjaan warga ini, termasuk dalam momen eksternalisasi. Momen ini membawa subjek pada kondisi “penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia” [14]. Dengan demikian, pilihan pekerjaan yang didasarkan pada kondisi sosial dan ekologis tersebut dapat disebut sebagai “*par-excellence*” sebagai sebuah “kenyataan hidup sehari-hari” [6] yang dipahami warga Sidoasri.

Kenyataan hidup sehari-hari yang kedua adalah perubahan ekologis, yang membawa pula pada perubahan kondisi kebencanaan. Pola bencana banjir sebelum tahun 2001 yang berupa banjir besar yang terjadi hingga tiga hari, kini hanya terjadi hanya beberapa jam saja, merupakan kondisi empiris yang dihadapi warga. Meskipun terdapat perubahan dalam hal intensitas kejadian, hingga pada tinggi air bah, dampak, maupun waktu kejadian, masyarakat tetap saja menamakannya sebagai “bencana banjir”. Inilah menurut Berger dan Luckman, terjadi proses “obyektifikasi (pengobyektifan)” dunia empiris tentang bencana [6]. Proses ini membawa subyek, membentuk tatanan obyek-obyek yang diberi nama. Maka, air yang meluap, yang hampir tiap tahun melanda dinamakannya sebagai “bencana banjir”.

Dalam kehidupan manusia dengan segala realitasnya ini kemudian menghadirkan dunia intersubjektif, suatu dunia yang dihuni oleh satu individu dengan individu yang lain [6]. Pertama, dunia intersubjektif ini terjadi pada level pengetahuan warga desa dalam hal kondisi geografis. Wilayah desa yang diapit oleh bukit dengan wilayah hutan,

disadari memberikan sumbangan atas fakta dunia empiris masyarakat. Namun demikian terdapat perubahan dunia intersubjektif di antara warga. Hal ini seiring dengan perubahan besar-besaran pengelolaan lahan hutan sekitar desa yang dilakukan oleh warga sejak awal 2000an. Ada banyak lahan *tetelan* yang dapat dirambah, yang kemudian pula memungkinkan warga untuk beralih pekerjaan, yang awalnya hanya petani sawah, menjadi pekebun.

Kedua, kondisi lingkungan ini kemudian berpengaruh pada pengetahuan dalam hal kebencanaan. Seperti halnya telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, air bah kiriman dari bukit, yang hampir tiap tahun melanda desa ini dibahasakannya sebagai “bencana”. Perihal pengetahuan atas bencana ini ternyata memiliki makna yang sama warga di desa ini. Bagi Berger dan Luckman, kondisi pengetahuan warga desa tepi hutan ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik disebut sebagai “kenyataan hidup sehari-hari, yang diterima begitu saja sebagai kenyataan...dan oleh karenanya kenyataan tersebut terjadi secara rutin dalam kehidupan” [6].

Hal tersebut serupa dengan tulisan Clausen yang menyatakan bahwa “*disasters are cultural*” [15]. Bencana sangat terkait dengan aktivitas kebudayaan manusia, baik sebelum, ketika, maupun setelah bencana. Dalam konteks warga desa tepi hutan, pekerjaan berupa perambah hutan merupakan bagian dari kebudayaan yang dibentuk oleh masyarakat. Dengan menggantungkan aspek ekonomi pada hasil hutan, memang ada jaminan ekonomi, tetapi di sisi lain justru memunculkan risiko ekologis berupa risiko bencana banjir. Bagi komunitas tepi hutan ini, menjadi perambah hutan telah menjadi sistem sosial yang mewarnai realitas sehari-hari, karena memang “bencana, melekat dengan sesuatu yang sifatnya alamiah dan hubungannya dengan sistem sosial yang berproses dari waktu ke waktu” [16]. Karena menjadi rutinitas, maka banjir melekat dengan realitas keseharian komunitas tepi hutan.

## 5. Simpulan

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan warga desa tepi hutan seperti Sidoasri, terkait bencana dipengaruhi oleh kondisi eksternal berupa perubahan ekologis, seperti perubahan pengelolaan hutan. Dari kondisi eksternal ini, masyarakat melakukan interaksi baik dengan lingkungan ekologis maupun sosialnya, yang kemudian membentuk tafsir atas bencana tersebut. Meskipun memberikan keterjaminan ekonomi, tak dapat dipungkiri, pembukaan lahan hutan membawa resiko ekologis berupa bencana banjir. Di satu sisi memberikan keamanan ekonomi, tetapi di sisi yang lain membawa dampak berupa munculnya resiko ekologis. Perubahan pengelolaan hutan ternyata mengubah kondisi kebencanaan.

## Referensi

- [1] Yunita, Ratna. 2013. *Produksi Ruang Lingkungan Tinggal Desa Melalui Konstruksi Pengetahuan Lokal Masyarakat di Desa Sidoasri, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang*. Skripsi pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Tidak Diterbitkan.
- [2] Sutopo, Dhanny S, dkk. 2013. *Praktik Sosial Di Desa Sidoasri*. Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Malang: Tidak Diterbitkan.
- [3] Purba, Dano, dkk. 2012. *Laporan Praktek Kerja Nyata: Implementasi Tanggung Jawab Sosial Pada Masyarakat Sidoasri Melalui Program Pemberdayaan Menuju Kemandirian Desa*. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Malang: Tidak diterbitkan.
- [4] Peluso, Nancy L. 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat, Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*. Jakarta: Konphalindo.
- [5] Indiyanto, Agus. 2012. Risiko Bencana: Mempertemukan Sains dan Pengetahuan Lokal, “*Respon Masyarakat Lokal atas Bencana, Kajian Integratif, Ilmu, Agama, dan Budaya, Buku Kedua*”. Bandung: Mizan media Utama.
- [6] Berger, Peter L. dan Thomas Luckman. 2012. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta : LP3ES.
- [7] Poloma, Margaret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [8] Abdullah, Irwan. 2008. “Konstruksi dan Reproduksi Sosial Atas Bencana Alam”. *Working Papers in Intersiplinary Studies*, no. 01 hlm. 19.
- [9] Kreps, Garry A. dan Thomas E. Drabek. 1996. “Disaster are Nonroutine Social Problems”, *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*. August 1996, vol 14 no 2, hlm. 133.
- [10] Novenanto, Anton. 2009. *Mediated Disaster, The Role of Alternative and Mainstream Media In The East Java Mud Volcano Disaster*. Tesis pada Department of Cultural Anthropology and Development Sociology, University of Leiden. Leiden.
- [11] Oliver-Smith, Anthony. 1991. “Successes and Failures in Post-Disaster Resettlement”, *The Journal of Disaster and Studies and Management*, vol. 15 no. 1 hlm. 13.
- [12] Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- [13] Khususiyah, Noviana, dkk. 2009. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM): Pembelajaran Keberhasilan & Kegagalan Program*. Dalam Brief no 01 Policy Analysis Unit, November 2009. World Agroforestry Centre.
- [14] Parera, Frans M. 2012. “Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber”. Pengantar dalam *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Jakarta : LP3ES.

- [15] Clausen, Lars. 1992. "Social Differentiation and the Long-Term Origin of Disasters". Dalam *Natural Hazards* 6: 181-190, 1992. 181. 1992 *Kluwer Academic Publishers*.
- [16] Hilhorst, Dorothea and Greg Bankoff. 2004. "Introduction: Mapping Vulnerability". Dalam *Mapping Vulnerability Disasters, Development and People*. Greg Bankoff, dkk. (ed.). London: Earthscan.
- [17] Imron, Ali dan Aat Hidayat. 2012. Dari Sabar Hingga Getok Tular: Kekuatan Agama dan Kearifan Lokal dalam Proses Kebangkitan Pasca Gempa di Kasongan, "*Respon Masyarakat Lokal atas Bencana, Kajian Integratif, Ilmu, Agama, dan Budaya, Buku Kedua.*" Bandung: Mizan media Utama.